

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kegamangan kondisi politik nasional memasuki awal tahun 2013 ditandai dengan terbongkarnya kasus-kasus yang melibatkan para petinggi partai, baik itu partai yang bernuansa agamis, maupun partai yang menegaskan dirinya sebagai partai nasionalis. Landasan ideologis yang menjadi pijakan dalam melakukan kegiatan politik, sepertinya sudah tidak lagi menjadi persoalan penting yang harus diketengahkan, terutama ketika partai sudah mulai berkolaborasi dengan logika kompetisi elektoral yang lebih mengutamakan perluasan ceruk pasar ketimbang membangun basis sosial kader ditingkatan akar rumput, hal ini tentunya berimplikasi pada melambungnya biaya politik guna mengkampanyekan gagasan politik partai kepada seluruh masyarakat yang terbebas dari segmen pemilih. Di samping itu, partai politik pun sudah mulai terjangkit penyakit “amnesia politik” yang “jauh panggang dari api” seakan-akan janji politik pada masa lalu, tidak membutuhkan pembuktian pada masa kini.

Tertangkapnya Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishaq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bukti nyata akan hal tersebut,

Partai yang sejak kemunculannya diidentifikasi sebagai partai dakwah ini, tak luput

dari perilaku politik yang kontra produktif dengan upaya pemberantasan korupsi yang

sudah sedari dulu menjadi tuntutan masyarakat. Anehnya, penangkapan yang dilakukan terhadap Presiden PKS ini dianggap oleh sebagian orang sebagai upaya terorganisir yang kental akan nuansa konspiratif guna menjatuhkan pamor partai dalam menyongsong pemilu 2014, yang kemudian diperkeruh dengan cerita-cerita konspirasi besar yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Zionis dan Cikeas<sup>1</sup>. Bagi penulis cerita konspiratif yang dilontarkan oleh pimpinan partai ini bagaikan pisau bermata dua, disatu sisi cerita ini dapat memperkuat internal partai terutama kader yang berada diberbagai daerah, tetapi disisi lain cerita ini dapat memperburuk citra partai dihadapan publik secara keseluruhan dikarenakan partai terkesan hendak menutup-nutupi kebenaran yang sudah senyatanya terjadi.

Jika merujuk jauh ke belakang, penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Lutfi Hasan Ishaq ini bukanlah kejadian tunggal tanpa preseden sebelumnya, sehingga sulit untuk dikatakan sebagai upaya konspiratif, misalnya kasus Suripto sebagai tokoh PKS dan mantan sekjen kehutanan yang tersangkut kasus pembelian 2 helikopter bekas, tudingan “jual beli” tiket pencalonan kepala daerah terhadap eks Wakapolri Adang Darajatun untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Inu Kencana untuk menjadi calon Walikota Payakumbuh, Kasus Misbakhun dan impor daging “berjanggut” di kementrian pertanian hingga kasus amoral Arifinto menonton video porno pada saat sidang di parlemen<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Lihat <http://abisyakir.wordpress.com/2013/02/01/> yang diakses pada tanggal 28 Februari 2013

<sup>2</sup>Lihat D. J. M. M. L. “Dilema PKS Sebagai ‘Suripto’” KPG (Kompetensi Populer Gramedia)

Selain kasus-kasus tersebut, PKS pun telah lama dirundung konflik internal partai yang tak berkesudahan, munculnya faksi-faksi di internal partai seperti yang diketengahkan oleh Burhanuddin Muhtadi dan Arief Munandar dalam desertasinya, menambah berat beban partai. Konflik yang terjadi di internal partai ini setidaknya merupakan dampak lanjutan dari perubahan yang dilakukan oleh partai pada tahun 2002 yang sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK) menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Perubahan nama partai dari PK menjadi PKS pada tahun 2002 ini sebenarnya merupakan upaya taktik strategis yang dilakukan oleh kader PK, karena pada pemilu sebelumnya tidak masuk dalam ambang batas parlemen (*Parlementery Treshold*). Bagi sebagian tokoh yang berada di partai, kekalahan partai pada pemilu 1999 diidentifikasi sebagai buntut dari kekakuan partai dalam merangkul konstituen yang hanya terpakupada golongan Islam fundamentalis, hal ini terlihat dari cita-cita perjuangan partai yang ingin mengembalikan kejayaan Islam pada masa kekhilafahan. Maka dari itu, guna mengoptimalkan ceruk pasar, isu penegakan khilafah islamiyah bukan lagi menjadi tema sentral dalam setiap pertemuan yang dilakukan oleh partai, melainkan bagaimana partai mampu memenangkan pertarungan dalam pemilihan umum yang lebih bersifat pragmatis realistis dengan mengedepankan isu-isu yang diperhatikan oleh pemilih Indonesia, misalnya isu

antara lain seperti: Hak Asasi Manusia (HAM) dan lain sebagainya. Walaupun

sejatinya cita-cita penegakan khilafah islamiyyah masih kental di dalam benak kaum elite dan kader partai berlambang dua bulan sabit dengan untaian padi ini.

Perubahan demi perubahan di dalam partai terus terjadi, termasuk diantaranya merubah partai yang semula terkesan eksklusif karena terlahir dari garis kaderisasi ideologis yang menuntut ketaatan, menjadi partai terbuka dengan sedikit menutupi kekakuan gerakan yang sudah menjadi rahasia umum. Isu menjadi partai terbuka pada tahun 2008 mendapat reaksi keras dari kubu konservatif yang dianggap sudah menyalahi garis perjuangan partai yang berjargon dak'wah ini, sementara bagi golongan progresif isu menjadi partai terbuka merupakan cara terbaik guna memenangkan partai dalam pemilihan umum, karena mau tidak mau dalam pemilihan umum partai harus mengikuti logika kompetisi elektoral yang tidak terpaku pada satu ruang keberagamaan. Tarik menarik manifestasi logika ideologis yang terjadi di internal partai ini menyebabkan PKS terpolarisasi menjadi dua faksi besar yang saling bersebrangan dalam menafsirkan kerangka perjuangan partai, yaitu "kubu keadilan" dan "kubu kesejahteraan"<sup>3</sup>.

Kondisi carut marut PKS dalam percaturan politik nasional dan ditambah dengan terpolarisasinya partai dalam dua faksi, membuat umat Islam merasa terbodohi, dikarenakan partai ini dianggap oleh masyarakat sebagai partai yang mampu mewakili umat Islam di dalam kancah politik. Anggapan itu muncul seiring

---

<sup>3</sup>Lihat Agus Suprianto, Akbar Tri Kurniawan dan Awan Ridho "Iklan Partai : Manifestasi Politik Faksi di Indonesia" Tahun 2014, Nomor 1, 2008, hal. 11. Umid Burhanuddin Muhtadi "Dilema PKS Suara dan

dengan banyaknya muatan kebijakan bernuansa syari'ah yang diperjuangkan oleh kader PKS diberbagai daerah, baik itu dalam bentuk konvensional maupun non-konvensional.

Tersandungnya partai terhadap berbagai kasus dan ditambah dengan konflik yang terjadi di internal partai ini setidaknya mampu menyadarkan masyarakat, bahwa pada hakikatnya semua partai politik sama-sama berorientasi pada kekuasaan dan dakwah hanya dijadikan sebagai instrument guna meraup suara pada saat pemilihan umum, baik pada tingkatan legislatif maupun eksekutif. Hal ini dilakukan oleh PKS mengingat, Indonesia merupakan negara yang lebih dari 80% menganut agama Islam dan dinobatkan sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia<sup>4</sup>. Di samping secara genetik PKS merupakan manifestasi sosio politis dari gerakan dakwah masa lalu yang mengalami proses hibernasi politik pada saat rezim orde baru berkuasa di bawah kepemimpinan Soeharto.

Melihat fenomena seperti ini, maka penulis merasa perlu adanya suatu penelitian yang membahas mengenai konflik politik internal PKS yang ditinjau dari sebab dan dampaknya serta dibubuhi dengan kubu yang memenangkan pertarungan ini dengan menjadikan ketersandungan kader ataupun tokoh ke dalam beberapa kasus sebagai pintu masuk guna menganalisis momentum kebangkitan kembali faksi yang selama ini tersisihkan.

---

<sup>4</sup>Lihat <http://www.anashir.com/2012/05/102159/46553/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-muslim-terbesar-di-dunia> yang diakses pada tanggal 1 Februari 2013

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS)?
2. Apa Faktor Penyebab dan Dampaknya terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS)?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konflik yang terjadi di dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah studi Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu terapan yang bisa langsung digunakan dimasyarakat. Dan adapun secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai upaya intelektual yang penulis lakukan untuk mengerjakan karya tulis ilmiah dalam bentuk Skripsi di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **b. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik secara teoritis

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas konflik yang terjadi di dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praksis

Penelitian ini dapat memetakan atau setidaknya memberikan gambaran prihal konflik yang terjadi di dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

## D. Kerangka Teori

### 1. Konflik

Istilah konflik berasal dari kata kerja bahasa Latin "*configure*" yang berarti saling memukul. Dari bahasa Latin diadopsi ke dalam bahasa Inggris "*conflict*" yang menurut Webster diartikan sebagai suatu "perkelahian, peperangan atau perjuangan"<sup>5</sup> lalu kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia "konflik". Para pakar telah mengemukakan berbagai definisi mengenai konflik, definisi yang dikemukakan oleh para pakar berbeda antara satu dan yang lainnya, walaupun intinya sama, karena mereka mendefinisikan konflik dari perspektif yang berbeda. Ada yang mendefinisikan dari perspektif psikologi, sains, perilaku, sosiologi, komunikasi, antropologi dan ilmu sosial.

Dan dalam hal ini, penulis mendefinisikan konflik dari perspektif konflik interpersonal atau konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik<sup>6</sup>. Lebih lanjut konflik dapat diartikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat tercapai secara simultan<sup>7</sup>.

Berdasarkan bentuknya, Lewis A. Coser membedakan konflik dalam dua bentuk, yakni:

- a. Konflik Realistis, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan dan ketidaksepemahaman cara pencapaian tujuan atau mengenai tujuan yang hendak dicapai. Dalam konflik jenis ini, interaksi konflik memfokuskan pada isu ketidaksepemahaman mengenai substansi atau objek konflik yang harus diselesaikan oleh pihak yang terlibat konflik.
- b. Konflik Non-realistis, yaitu konflik yang terjadi tidak berhubungan dengan isu substansi penyebab konflik. Konflik ini dipicu oleh kebencian atau prasangka terhadap lawan politik yang mendorong melakukan agresi untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan konfliknya. Penyelesaian

---

<sup>6</sup> Lihat Wirawan "Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi dan Penelitian", Salemba Humanika, Jakarta, 2010 Hal 4-5

<sup>7</sup> Lihat Coseriu, Lewis A. "Konflik Sosial", J. B. J. "Teori Konflik Sosial", Hal 10



perbedaan pendapat mengenai isu penyebab konflik tidak penting. Hal yang penting adalah bagaimana mengalahkan lawannya<sup>8</sup>.

Mengenai manajemen konflik, kita bisa meminjam kategori teoritis dari Rogers. W. Cobb, Charles D. Elder dan E.E Schattshneider untuk menggambarkan pola manajemen konflik politik. Rogers W. Cobb dan kawan-kawan mengungkapkan adanya tiga dimensi penting dalam konflik politik, yaitu:

a. Luas Konflik.

Luas konflik menunjuk pada jumlah perseorangan atau kelompok yang terlibat di dalam konflik, serta menunjuk pada skala konflik yang terjadi, misalnya konflik lokal, konflik nasional, konflik internasional dan konflik agama.

b. Intensitas Konflik

Intensitas konflik adalah sempit luasnya komitmen sosial yang bisa terbangun akibat sebuah konflik. Konflik yang intensitasnya tinggi adalah konflik yang bisa membangun komitmen sosial yang luas, sehingga luas konflik pun mengembang.

c. Ketampakan Konflik

Ketampakan konflik adalah tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat di luar pihak-pihak yang berkonflik, tentang peristiwa konflik terjadi. Sebuah konflik dikatakan mempunyai ketampakan yang tinggi manakala peristiwa konflik itu

---

<sup>8</sup> lihat Onait Wiseman "Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian" Hal 59

disadari dan diketahui keberadaannya oleh masyarakat secara luas. Sebaliknya, sebuah konflik memiliki ketampakan rendah manakala konflik itu diselimuti oleh berbagai hal sehingga tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat luas terhadap konflik itu sangat terbatas.

Dalam hal ini E.E Schattsneider menambahkan konsep sosialisasi konflik dan privatisasi konflik. Sosialisasi konflik adalah upaya yang dilakukan pihak partisipan konflik yang lemah, untuk memperluas khalayak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan sebuah konflik. Sebuah konflik tersosialisasi akan membuat konflik itu berkembang dan meluas sehingga makin besarlh luas, intensitas dan ketampakannya. Sosialisasi konflik berhasil manakala pihak yang lemah dalam konflik dapat memperkuat dirinya. Sementara itu, privatisasi konflik adalah upaya yang dilakukan oleh pihak yang kuat atau pengelola konflik untuk membatasi agar luas, intensitas dan ketampakan konflik tidak berkembang besar. Dengan meminjam kategori teoritis tersebut, maka dapat digambarkan bahwa manajemen konflik politik memiliki lima dimensi, yaitu luas, intensitas, ketampakan, sosialisasi dan privatisasi konflik politik<sup>9</sup>

Lebih Lanjut, Lewis A. Coser membedakan adanya konflik *in-grup* dan *out grup*. Konflik *in-grup* adalah konflik yang terjadi dalam kelompok itu sendiri. Contoh konflik *in-grup* adalah konflik yang terjadi antar anggota atau geng. Konflik *out-*

---

<sup>9</sup> Lihat Ign Isyanto dkk "Pemilihan Secara Langsung 2004 Dokumentasi, Analisis dan Kritik". Galang

grup adalah konflik yang terjadi antara suatu kelompok dengan kelompok lain, contoh konflik *out-grup* adalah konflik antara masyarakat Dayak dan masyarakat Madura<sup>10</sup>. Dan jika ditinjau dari bidang kehidupan, konflik dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk konflik ekonomi, konflik bisnis, konflik agama, konflik sosial, konflik budaya serta konflik politik<sup>11</sup>. Dan dalam penelitian ini, penulis menempatkan konflik dalam kategori konflik politik yang diartikan sebagai konflik yang terjadi akibat kepentingan atau tujuan politis yang berbeda antara seseorang atau kelompok<sup>12</sup>, yang terjadi di dalam (*in-grup*) partai politik, khususnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

## 2. Partai Politik

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*)<sup>13</sup>, Negara Indonesia berdasarkan hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka<sup>14</sup> dan bukan berdasarkan pada *Maschtstaat* (hukum rimba)<sup>15</sup>. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terkait dengan tata kelola kenegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara sudah semestinya termaktub dalam konstitusi, termasuk di dalamnya tentang keberadaan partai politik.

Di dalam UU No. 2 Tahun 2011, partai politik diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara

---

<sup>10</sup>Lihat Kun maryati dan Juju Suryawati "Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas XI", Esis Sebuah imprint dari Penerbit Erlangga, Jakarta, 2006 Hal 59

<sup>11</sup>Lihat 'Opcit Wirawan "Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi dan Penelitian" Hal 62-100

<sup>12</sup>Lihat <http://sayakahamazaki.blogspot.com/2012/07/konflik-politik.html> yang diakses pada tanggal 27 Februari 2013

<sup>13</sup>Lihat UUD 1945 pada BAB I mengenai Bentuk dan Kedaulatan Pada Pasal 1 ayat 3.

<sup>14</sup>Lihat A. Siti Soetami "Pengantar Tata Hukum Indonesia" Edisi Revisi, PT Refika Aditama, Bandung, 2007 Hal 57

<sup>15</sup>Lihat A. Siti Soetami "Pengantar Tata Hukum Indonesia" Edisi Revisi, PT Refika Aditama, Bandung, 2007 Hal 57

sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945<sup>16</sup>. Dan secara umum partai politik didefinisikan sebagai sekelompok manusia terorganisir, yang anggotanya sedikit banyak memiliki orientasi nilai-nilai serta cita-cita yang sama, dan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik serta mempertahankannya guna melaksanakan program yang telah ditetapkan<sup>17</sup>. Lebih lanjut partai politik dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang mempunyai doktrin politik yang sama<sup>18</sup>. Dan adapun fungsi partai politik menurut Miriam Budiarto<sup>19</sup> adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi politik

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Atau secara konvensional komunikasi politik diartikan sebagai proses penyampaian pesan-pesan politik dari komunikator kepada komunikan dalam arti yang luas<sup>20</sup>. Selanjutnya secara *inhern* komunikasi politik pun berupaya untuk menampung dan

---

<sup>16</sup>Lihat UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik pada pasal 1 ayat 1

<sup>17</sup>Lihat Miriam Budiarto "Dasar-Dasar Ilmu Politik", PT Gramedia Putaka Utama, Jakarta, 2008 Hal 422

<sup>18</sup>Lihat Rusadi Kantraprawira, "Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar", Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006 Hal 64

<sup>19</sup>Lihat "Op cit, Miriam Budiarto" Dasar-Dasar Ilmu Politik" hal 405-410

<sup>20</sup>Lihat PPT Dian Eka Rahmawati dalam Mata Kuliah "Komunikasi Politik" Jurusan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tidak

menggabungkan pendapat masyarakat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan memberikan usul-usul program maupun kebijakan. Hal ini sering disebut dengan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*), sesudah digabungkan pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan secara lebih teratur atau yang biasa disebut sebagai perumusan kepentingan (*interest articulation*)<sup>21</sup>.

Lebih lanjut agregasi kepentingan diartikan sebagai cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternatif pembuatan kebijakan publik dan artikulasi kepentingan diartikan sebagai suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik<sup>22</sup>.

## 2. Sosialisasi politik

Sosialisasi Politik adalah sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada, atau menurut M. Rush mendefinisikan sosialisasi politik sebagai proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap sistem politik. Sosialisasi politik ini sangat penting guna

<sup>21</sup>Lihat' Opcit, Miriam budiarjo"Dasar-Dasar Ilmu Politik" Hal 405

<sup>22</sup>Lihat Retno Listriyati dan Setiadi (penyusun) "Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMK dan MAK Kelas X", Erlangga, Jakarta, 2008 Hal 164 dan 165

membangun persepsi tentang kondisi politik, nilai-nilai politik, sikap politik dan pola tingkah laku yang berjalan terus menerus, baik itu di sekolah, keluarga, kelompok pergaulan, pekerjaan, media massa dan kontak-kontak politik langsung<sup>23</sup>. Dari segi metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi dua, yakni pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Sedangkan indoktrinasi politik ialah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik. Melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologis, dan latihan yang penuh disiplin, dan biasanya indoktrinasi politik terjadi dalam sistem totaliter<sup>24</sup>.

### 3. Rekrutmen politik

Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya<sup>25</sup>. Setidaknya ada dua cara dalam pelaksanaan rekrutmen politik ini, yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup, untuk lebih jelasnya mari kita simak pemaparan di bawah ini:

---

<sup>23</sup>Lihat PPT Awang Darumurti "Sistem Politik Indonesia" Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pertemuan ke 2 dan 3, Tidak Diterbitkan

<sup>24</sup>Lihat Ramlan Surbakti "Memahami Ilmu Politik" PT Grasindo Jakarta 1999 Hal 117-118

- a. Rekrutmen terbuka artinya seluruh warga negara tanpa terkecuali mempunyai kesempatan pertama untuk direkrut apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.
- b. Rekrutmen tertutup, yaitu proses rekrutmen secara terbatas, artinya hanya individu-individu yang tertentu saja yang direkrut untuk menduduki jabatan politik atau jabatan pemerintahan. Dalam konteks rekrutmen tertutup politik, maka individu-individu yang dekat dengan penguasa atau pemimpin politiklah yang memiliki kesempatan untuk masuk dalam partai politik atau menduduki jabatan politik<sup>26</sup>.

#### 4. Pengaturan konflik

Partai politik dalam tataran ini memiliki fungsi sebagai pengendali konflik baik itu konflik yang berbentuk silang pendapat sampai pada persinggungan fisik antar individu maupun kelompok, terlebih lagi Indonesia merupakan negara majemuk yang tersegmentasi dalam ruang-ruang yang berbeda, seperti suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), sehingga keberadaan partai politik sebagai pengendali konflik merupakan fungsi yang sangat penting guna menginisiasi proses dialog terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Menurut Lipjhart: perbedaan-perbedaan atau perpecahan di tingkat masa bawah dapat diatasi oleh kerja sama diantara elit-elit politik<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup>Lihat Syamsuddin Haris (Ed) "*Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai, Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*", PT Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 2005 Hal 144

Menurut Miriam Budiarto, Partai Politik dapat diklasifikasikan berdasarkan komposisi dan fungsi keanggotaannya yang terbagi dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Partai Massa adalah partai yang mengutamakan kekuatan berdasarkan jumlah anggota, oleh karena itu ia biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat untuk bernaung di bawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur. Atau dengan kata lain partai massa adalah partai yang mengutamakan jumlah anggota dengan ikatan yang longgar<sup>28</sup>.
- b. Partai Kader adalah partai yang mementingkan ketaatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan<sup>29</sup>. Secara sederhana partai kader dapat pula diartikan sebagai partai yang menekankan loyalitas dan disiplin anggota yang tidak perlu berjumlah banyak<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup>Lihat Muchamad Ali Safa'at "Pembubaran Partai Politik, Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011 Hal 55

<sup>29</sup>Lihat Miriam Budiarto "Dasar-Dasar Ilmu Politik", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005 Hal 166

<sup>30</sup>Lihat 'Opcit Muchamad Ali Safa'at "Pembubaran Partai Politik, Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik" Hal 55



Selanjutnya, partai politik dapat diklasifikasikan berdasarkan komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan. Sekurang-kurangnya terdapat 5 jenis partai politik, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Partai Proto.

Partai proto adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini. partai semacam ini muncul di Eropa Barat sekitar abad pertengahan hingga akhir abad ke-19. Ciri paling menonjol dari partai proto adalah pembedaan antara kelompok anggota atau "*ins*" dengan non anggota atau "*outs*". Selebihnya, partai ini belum menunjukkan ciri sebagai partai politik dalam pengertian modern. Karena ini sesungguhnya partai proto adalah faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologis masyarakat.

#### 2. Partai Kader

Partai kader merupakan perkembangan lebih lanjut partai proto. Partai ini muncul sebelum diterapkannya sistem hak pilih secara luas bagi rakyat hingga sangat bergantung pada kelas menengah ke atas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan serta pemberi dana. Tingkat organisasi dan ideologi partai kader sesungguhnya masih rendah karena aktivitasnya jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat.

Keanggotaan partai ini terutama dari golongan kelas menengah ke atas.

Akibatnya ideologi yang dianut partai ini adalah konservatisme ekstrem atau

maksimal reformis moderat. Karena itu partai kader tidak memerlukan organisasi besar yang dapat memobilisasi massa. Dengan demikian, dalam pengertian ini partai kader lebih tampak sebagai suatu kelompok informal daripada sebagai organisasi yang didasarkan pada disiplin. Contohnya Partai Radikal Sosialis (*parti republicain radical et radical-sosialiste*) pada masa Republik ketiga, keempat dan kelima di Prancis. Dewasa ini ciri partai kader masih dapat ditemukan pada partai-partai Liberal di Itali dan partai Kebebasan dan Demokrasi Rakyat di Belanda.

### 3. Partai Massa

Partai massa muncul pada saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap suatu respon politis dan organisasional bagi perluasan hak-hak pilih serta pendorong bagi perluasan lebih lanjut hak-hak pilih tersebut. Jadi, latar belakang munculnya partai massa amat bertolak belakang dengan kemunculan partai proto maupun partai kader. Partai proto dan partai kader terbentuk di dalam lingkungan parlemen (*intra-parlemen*), memiliki basis pendukung kelas menengah ke atas, serta memiliki tingkat organisasional dan ideologis yang rendah. Sebaliknya partai massa dibentuk di luar lingkungan parlemen (*ektra-parlemen*), berorientasi pada basis pendukung yang luas, misalnya buruh, petani, dan kelompok agama, dan memiliki ideologi yang cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya. Tujuan utama partai ini tidak hanya memperoleh kemenangan dalam pemilihan tetapi juga

“memberikan pendidikan politik bagi para anggotanya dalam rangka membentuk elite yang langsung direkrut dari massa”, Contohnya Partai Sosialis Prancis.

#### 4. Partai Diktatorial

Partai diktatorial sebenarnya merupakan sub-tipe dari partai massa, tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin partai ini melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan maupun anggota-anggota partai. Rekrutmen keanggotaan partai diktatorial dilakukan secara lebih selektif dari pada partai massa. Untuk diterima sebagai anggota partai ini seseorang diuji kesetiaan dan komitmennya terhadap ideologi partai. Partai diktatorial menuntut pengabdian secara total setiap anggotanya, contoh partai diktatorial adalah partai-partai Komunis di Eropa Timur, Kuba, Vietnam dan partai Fasis di Italia

#### 5. Partai Catch-all

Partai catch-all merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Istilah catch-all pertama kali dikemukakan oleh Otto Kirchheimer untuk memberikan tipologi pada kecenderungan perubahan karakteristik partai-partai Eropa Barat pada masa pasca Perang Dunia Kedua. Catch-all dapat diartikan sebagai “menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggota-anggotanya”. Tujuan utama partai ini adalah keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi

yang kaku. Dengan demikian, aktivitas partai ini erat berkaitan dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan<sup>31</sup>.

Perubahan yang dilakukan oleh partai kader dan partai massa untuk menjadi partai catch-all, setidaknya dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, pengurangan drastis muatan ideologis partai. Ideologi hanya dijadikan selubung tipis bagi sesuatu yang dikenal "Molletisme", yaitu dominasi absolute pertimbangan taktis jangka pendek.

*Kedua*, penguatan kelompok-kelompok pemimpin tertinggi, yang keberhasilan atau kegagalannya dinilai dari sumbangannya terhadap efisiensi keseluruhan sistem sosial, bukan lagi pada ketaatan tujuan-tujuan organisasi.

*Ketiga*, pengurangan arti penting individu anggota partai. Peran tersebut dianggap sebagai warisan sejarah yang dapat mengaburkan gambaran partai catch-all yang baru dibentuk.

*Keempat*, pengurangan arti penting *classe gardee*, yaitu kelas sosial spesifik atau pengikut agama tertentu sebagai basis partai agar dapat merekrut pemilih-pemilih dari kalangan masyarakat luas.

<sup>31</sup> Lihat Likhonk Anel "Tiga Tiga Masalah Partai Politik", PT Tiga Wacana Yogya, Yogyakarta

*Kelima*, pembinaan akses ke berbagai kelompok kepentingan. Alasan keuangan memang cukup penting dalam hal ini, tetapi bukan merupakan hal yang paling penting apabila pembiayaan resmi telah tersedia sebagaimana di Jerman dan jalur komunikasi terbuka lebar seperti di Inggris dan Jerman. Alasan yang paling utama sesungguhnya adalah untuk memperoleh dukungan dalam pemilu melalui perantara kelompok-kelompok kepentingan<sup>32</sup>.

Fenomena lain yang menonjol dan menarik diamati dalam konteks Partai Keadilan Sejahtera adalah adanya faksionalisasi atau pengelompokan dalam organisasi internal partai, dengan mengutip tipologi sederhana yang digagas oleh Belloni, ada tiga jenis faksi, yaitu:

*Pertama*, jenis faksi yang terbentuk kesamaan pandangan dalam melihat isu-isu politik. Dalam ikatan amat informal, faksi jenis ini biasanya tidak berusia panjang dan hanya eksis saat merespons isu-isu strategis partai.

*Kedua*, kelompok dalam partai yang terbentuk dalam pola *patron-klien* atau pemimpin-pengikut. Biasanya amat dipengaruhi faktor personal *leadership*, yaitu persaingan tokoh-tokoh yang berpengaruh dari suatu partai yang masing-masing mempunyai konstituen yang jelas.

*Ketiga*, tipe faksi yang paling formal dan terorganisir. Faksi jenis ini biasanya tidak saja mempunyai nama resmi, tetapi juga kesekretarian dan program-program

<sup>32</sup> Lihat 'Ibid' Jelasul Amel "Teori Teori Mutakhir Partai Politik" Hal 51

tersendiri. Pada banyak kasus seperti Jepang dan Italia, eksistensi faksi ini dijamin oleh Anggaran Dasar dan Rumah Tangga partai.

Fenomena faksionalisasi yang terwujud dalam konflik internal partai, seperti kita sadari, membuat perhatian partai terhadap konstituennya tidak saja sangat berkurang, tapi bahkan habis sama sekali. Elite-elite partai sering melalaikan konstituennya dan menganggap bahwa persaingan merebut jabatan dalam partai ataupun urusan administrasi kepartaian yang jauh lebih penting. Ketika situasi ini terjadi, masyarakat Indonesia terbodohi mengapa mereka memilih partai yang gemar berkonflik. Tapi masyarakat tak memilih jalan lain untuk memilih partai yang tidak gemar konflik<sup>33</sup>.

Selanjutnya, Wolinetz mengemukakan skema kategorisasi berdasarkan orientasi partai, yaitu partai pejuang kebijakan (*The policy-seeking party*), partai pengejar suara (*The vote-seeking party*), dan partai pengejar jabatan publik (*The office-seeking party*). Kategorisasi tersebut kerap digunakan dalam kajian tentang pembentukan koalisi dalam demokrasi modern. Menurut Wolinetz, kategorisasi tersebut juga menggambarkan perilaku dan kecenderungan faksi-faksi yang ada dalam partai, di samping struktur dan organisasi partai. Penjelasannya sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> lihat Keindia "Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi" Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004

1. *The policy-seeking party* adalah partai yang berorientasi pada isu dan memprioritaskan artikulasi kebijakannya dibandingkan merebut suara pemilih atau menduduki jabatan-jabatan publik. Dengan demikian, terdapat sejumlah anggota yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap sebagian atau seluruh tujuan partai.
2. *The vote-seeking party* adalah partai yang berorientasi pada kemenangan pemilu, sehingga hal-hal tersebut, termasuk kebijakan dan jabatan publik yang dikejar disesuaikan dengan tujuan tersebut, organisasi partai disusun minimalis, terdiri dari profesional partai, kandidat, dan calon kandidat, yang dapat dibantu oleh sejumlah relawan sesuai dengan kebutuhan.
3. *The office-seeking party* adalah partai yang berorientasi menduduki jabatan-jabatan publik, baik dengan kekuatan sendiri, maupun berkoalisi dengan kekuatan politik lain, baik dengan tujuan mempertahankan diri, menyeimbangkan sistem politik yang bekerja, atau memperoleh akses terhadap patron. Dengan demikian, partai jenis ini tidak akan berkomitmen terhadap kebijakan atau strategi yang akan membuat kekuatan-kekuatan politik lain enggan berkoalisi dengannya. Partai jenis ini tidak cocok bagi para kader ideologis, dan lebih mampu mempertahankan para pemburu jabatan. Dalam partai ini, kecenderungan faksionalisasi untuk memperebutkan sumber daya partai akan semakin luas seiring dengan bertambah besarnya ukuran

Namun perlu dicatat bahwa kategori berdasarkan orientasi tersebut tidak bersifat *mutually exclusive* dan independen satu sama lain, sehingga tidak ada partai yang sepenuhnya *policy-seeking*, *vote-seeking*, atau *office-seeking*, walaupun biasanya ada satu orientasi yang lebih menonjol. Orientasi tersebut merupakan fitur yang melekat relatif kuat pada partai, sehingga hanya bisa diubah dengan serangkaian upaya yang konsisten dari individu atau kelompok dalam partai.

Dalam setiap partai terdapat pengelompokan atau faksionalisasi berdasarkan ketiga orientasi tersebut- *policy seekers*, *vote seekers*, *office seekers*- sehingga "wajah" partai pada suatu saat tertentu akan ditentukan oleh faksi mana yang terkuat pada saat itu. Sejalan dengan itu, Roemer mengemukakan model faksionalisasi yang terdiri dari kelompok reformis, oportunistis, dan militan. Secara ringkas Roemer menggambarkan bahwa *Faksi reformis* adalah mereka yang berorientasi pada upaya mencapai tujuan-tujuan pragmatis partai, *utility function*, secara maksimum. *Faksi oportunistis* adalah mereka yang menggunakan partai sebagai kendaraan untuk mencapai karir politik yang lebih tinggi, sehingga sasaran mereka adalah memenangkan sebanyak mungkin suara pemilih. Sementara itu *Faksi militan* adalah mereka yang berupaya untuk mengartikulasikan kebijakan partai sedekat mungkin dengan rumusan kebijakan yang ideal. Dengan demikian, faksi militan tidak melihat pemilu sebagai



kompetisi yang harus dimenangkan, melainkan media untuk mempublikasikan pandangan-pandangan partai<sup>34</sup>.

Selanjutnya, dalam hal ini penting kiranya untuk mengetengahkan Teori Hukum Besi Oligarkis (*The iron law of oligarch*) guna melihat fenomena oligarkis yang inheren berada di dalam organisasi. Menurut Robert Michels “Organisasilah yang melahirkan dominasi terpilih atas para pemilihnya, antara si mandataris dengan si pemberi mandat dan antara penerima kekuasaan dengan sang pemberi. Siapa saja yang berbicara tentang organisasi, maka sebenarnya ia berbicara mengenai oligarki”<sup>35</sup>.

Secara definitif, *Hukum Besi Oligarki* dapat diartikan sebagai situasi dimana pemerintah, yang berkuasa, kekuatan-kekuatan fraksi di perlemen bersama sekelompok pengusaha bekerjasama untuk menentukan berbagai kebijaksanaan politik, sosial dan ekonomi negara tanpa harus menanyakan bagaimana sesungguhnya aspirasi rakyat yang sebenarnya<sup>36</sup>. Atau bisa diartikan pula sebagai kondisi dimana partai dikuasai oleh golongan atau segelintir orang yang memiliki keinginan khusus untuk menguasai rakyat<sup>37</sup>. Penguasaan yang dilakukan oleh segelintir elite ini setidaknya diidentifikasi sebagai buah dari sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh

<sup>34</sup>Lihat Desertasi Arief Munandar “*Antara Jemaah dan Partai Politik, Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004*” Program Pasca Sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Hal 17-19, Tidak Diterbitkan.

<sup>35</sup>Lihat Robert Michels “*Partai Politik, Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*”, CV Rajawali, Jakarta, 1984 Hal xxvii

<sup>36</sup> Lihat <http://indonesiagituloh.com/catatan/lepas/186-perangkap-hukum-besi-oligarki> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2013

<sup>37</sup> Lihat <http://indonesiagituloh.com/catatan/lepas/186-perangkap-hukum-besi-oligarki> yang diakses pada tanggal 8

kaum elite partai, Robert Michels mengemukakan dua tema pokok di dalam pembahasannya tentang kepemimpinan. *Pertama*, kebutuhan akan pemimpin di dalam setiap kehidupan berkelompok dan *Kedua* sifat superioritas dari pemimpin. Adalah alami bahwa setiap masyarakat atau kelompok memerlukan pemimpin. Namun di samping keperluan itu, pemimpin selalu unggul posisinya. Keunggulan itu dimungkinkan oleh faktor-faktor teknis-administratif, psikologis dan intelektualitas yang lebih dikuasai oleh elite.

Lebih lanjut Robert Michels menjelaskan, justru berbagai keunggulan elite partai dan harapan-harapan massa itulah yang secara bersama-sama membangun situasi bagi tumbuhnya pola tingkah laku oligarkis di dalam partai. Michels melihat bahwa kadar peluang elite untuk memanfaatkan suasana itu, sehingga mereka menuju kepada sistem oligarkis, pertama kali ditentukan oleh pemimpin itu sendiri dan kedua ditentukan oleh faktor keorganisasian<sup>38</sup>.

Ironisnya, Permasalahan oligarkis ini diperparah dengan adanya “perkawinan haram” antara partai yang diwakilkan oleh kelompok elite, yang bercampur dengan landasan ideologis keagamaan yang mampu mengangkat derajat keberadaan pemimpin sampai pada titik kultus individu, yang tentunya hal ini berangkat pola reduksionalisasi terhadap teks-teks normatif keagamaan sebagai dampak lanjutan dari pemahaman yang timpang dan tidak menyeluruh terhadap kandungan ayat-ayat yang termaktub di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits.

<sup>38</sup> Lihat ‘Oasis Robert Michels “Partai Politik: Kesendaannya Oligarkis dalam Birukasa” Hal. xiii

PKS yang diidentifikasi sebagai partai Islam tak luput dari permasalahan ini, seperti yang kita pahami, Islam mengajarkan bahwa pemimpin adalah tokoh terpilih berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sebagai pemimpin politik Islam, mereka bukan saja memanfaatkan sumberdaya politik secara sosiologis, akan tetapi juga memanfaatkan konsep khilafah yaitu sebagai "wakil" tuhan di dunia. Ajaran seperti itulah yang mengandung potensi rasionalisasi oligarki. Sebab, kharisma pemimpin yang dibangunnya menjadikan para pemimpin punya kedudukan dan kekuatan istimewa. Berdasarkan kharisma itulah, pemimpin partai mengendalikan oligarki<sup>39</sup>.

### 3. Gerakan Sosial

Fenomena munculnya PKS dalam kancah politik Nasional senyatanya tidak bisa dilepaskan dari proses transformasi yang dilakukan oleh gerakan dakwah pada akhir masa orde baru. Maka dari itu, penting kiranya untuk mengetengahkan teori gerakan sosial guna melihat transformasi yang dilakukan oleh gerakan dakwah menjadi partai politik bernama Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Menurut Giddens gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Pengertian yang nyaris persis diutarakan oleh Tarrow yang menempatkan gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa -- yang bergabung dengan para

---

<sup>39</sup>Lihat 'Opcit Syamsuddin Haris "Pemilu Langsung di Tengah Oligarkis Partai, Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004" Hal 195

kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh – melakukan kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas dan pihak-pihak lawan lainnya<sup>40</sup>.

Michael Useem mendefinisikan gerakan sosial sebagai “tindakan kolektif terorganisasi, yang dimaksudkan untuk mengadakan perubahan sosial”, Jhon Mc Charty dan Mayer Zald melangkah lebih rinci dengan mendefinisikan gerakan sosial sebagai “upaya terorganisasi untuk mengadakan perubahan di dalam distribusi hal-hal apapun yang bernilai secara sosial”. Sedangkan Charles Tilly menambahkan corak perseteruan (*contentious*) atau perlawanan di dalam interaksi antara gerakan sosial dan lawan-lawannya. Dalam definisinya, gerakan sosial adalah “upaya mengadakan perubahan melalui interaksi yang mengandung perseteruan dan berkelanjutan diantara Negara dan warga Negara<sup>41</sup>”, Dalam hal pendefinisian, penulis lebih sepakat dengan yang dikatakan oleh David Meyer dan Sidney Tarrow, yang mengajukan sebuah definisi yang lebih inklusif tentang gerakan sosial, yakni “tantangan-tantangan bersama, yang didasarkan atas tujuan solidaritas bersama, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, saingan atau musuh, dan pemegang otoritas”. Definsi ini memiliki dua fitur yang menonjol, yaitu:

*Pertama*, gerakan-gerakan sosial melibatkan “tantangan kolektif”, yakni upaya-upaya terorganisir untuk mengadakan perubahan di dalam aransem-

---

<sup>40</sup>Lihat Tim Penyusun Buku Seri Demokrasi II Program Penguatan Simpul Demokrasi “*Gerakan Sosial, Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan di Indonesia*”, Program Penguatan Simpul Demokrasi Bekerjasama Dengan Averroes Press, Malang, 2006, Hal 1

<sup>41</sup>Lihat Quintan Wiktorowicz (ed) “*Aktivisme Islam, Pendekatan Teori Gerakan Sosial (edisi digital)*”, Demokrasi Berjasa: Yayasan Abad Demokrasi, Jakarta, 2007, Hal 2

aransemen kelembagaan. Tantangan-tantangan ini dapat berpusat pada kebijakan-kebijakan publik atau ditujukan untuk mengawali perubahan yang lebih luas dalam struktur lembaga-lembaga sosial dan politik, distribusi jaminan sosial, atau dapat pula menyangkut konseptualisasi mengenai hak-hak dan tanggung jawab sosial politik.

*Kedua*, corak politis yang inheren di dalam gerakan-gerakan sosial. Ini terutama dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai lewat gerakan-gerakan sosial, yang secara tipikal mencakup perubahan di dalam distribusi kekuasaan dan kewenangan. Tujuan-tujuan politis ini hanya mungkin dicapai lewat interaksi-interaksi yang terus menerus, berkelanjutan, dengan aktor-aktor politik diluar gerakan, yang terpenting diantaranya adalah sekutu-sekutu dan pesaing-pesaing dan pemegang otoritas kekuasaan<sup>42</sup>.

Secara rinci, Mc Adam dan Snow mendaftarkan sejumlah karakteristik gerakan sosial sebagai berikut:

1. Berbentuk aksi-aksi kolektif dan bersama.
2. Memiliki tujuan yang berorientasi perubahan.
3. Memiliki karakter sebagai organisasi.
4. Memiliki aspek kontinuitas meski kadang temporal.

5. Aksi kolektif bersifat ekstra institusional atau setidaknya kombinasi antara aksi-aksi ekstra intitusional (demonstrasi di jalan-jalan) dan institusional (lobi)<sup>43</sup>.

Apabila ditinjau berdasarkan basis ideologis, gerakan sosial dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Gerakan sosial revolusioner

Gerakan-gerakan sosial revolusioner mendukung pergantian kerangka nilai yang ada yang bermaksud mengubah masyarakat dengan menantang nilai-nilai fundamental.

2. Gerakan sosial reformis

Gerakan-gerakan sosial reformis mengupayakan perubahan-perubahan yang akan mengimplementasikan kerangka-kerangka nilai yang ada secara memadai<sup>44</sup>.

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan di dalam gerakan sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*)

Struktur kesempatan politik ini tidak hanya terfokus secara sempit pada kehidupan internal organisasi gerakan, tetapi memberikan perhatian yang lebih

---

<sup>43</sup>Lihat 'Opic Burhanuddin Muhtadi "Dilema PKS Suara dan Syariah", Hal 51

<sup>44</sup>... "Reformasi Sosial dan Politik: Suatu Pendekatan Baru" PT Pustaka

sistematis pada lingkungan politik dan institusi. Gerakan sosial ditentukan oleh peluang dan ancaman di dalam sistem politik tertentu dan lingkungan yang lebih luas<sup>45</sup>. Sedangkan Quintan Wiktorowick mendefinisikannya sebagai konsep politik yang lebih luas berupa represi negara dan perpecahan dikalangan elite yang dominan, konsep ini melingkupi kondisi-kondisi yang beragam yang di bawahnya perlawanan gerakan-gerakan sosial tumbuh dan berkembang atau merosot dan mati. Dalam salah satu esainya McAdam menguraikan empat dimensi kesempatan politik, yaitu :

- a. Keterbukaan atau tertutupan relatif dari sistem politik yang formal dan terlembagakan.
- b. Stabilitas atau instabilitas aliansi kelompok elite yang secara tipikal mencirikan sebuah komunitas politik.
- c. Ada atau tidaknya sekutu ditingkatan elite, dan
- d. Kemampuan aparat-aparat negara untuk melakukan represi dan bagaimana caranya<sup>46</sup>.

## 2. Mobilisasi Sumberdaya (*resource mobilization*)

Perspektif ini melihat bahwa masalah dan ketegangan sosial sebagai sesuatu yang nyaris melekat dalam masyarakat. Karena itu, gerakan sosial sangat tergantung pada kemampuan mobilisasi sumberdaya, akumulasi sumberdaya dan koordinasi diantara aktor politik untuk merespon masalah tersebut. Perspektif mobilisasi

---

<sup>45</sup>Lihat McAdam, et.all dalam Pdf Irawati "Identitas Kultural dan Gerakan Politik Kerapatan Adat Kutai dalam Representasi Politik Lokal".

<sup>46</sup>Quintan Wiktorowick (1968) "Aliansi Elite, Represi, dan Gerakan Sosial" Hal 16

sumberdaya mengajukan tesis baru bahwa organisasi-organisasi gerakan memberikan struktur mobilisasi yang sangat krusial bagi aksi kolektif dalam bentuk apapun. Bagi para pendukung teori ini, aksi kolektif merupakan sarana untuk mencapai tujuan, cara yang dipilih diantara berbagai cara yang tersedia. Dalam hal inilah organisasi dalam gerakan secara signifikan berfungsi sebagai berikut:

- a. Kontruksi dan rekontruksi keyakinan-keyakinan kolektif.
  - b. Mentransformasikan ketidakpuasan ke dalam aksi kolektif, dan
  - c. Mempertahankan komitmen terhadap gerakan<sup>47</sup>.
3. Pemingkai aksi kolektif (*collective action frames*)

Pendekatan ini lebih memusatkan perhatian pada peranan usaha menguasai ide-ide dan identitas-identitas baru dalam membentuk gerakan-gerakan sosial. Pendekatan ini memfokuskan kajiannya pada pertanyaan seperti bagaimana para aktor sosial membingkai klaim-klaim mereka, identitas-identitas mereka, menentukan lawan-lawan mereka. Para calon organisator gerakan melakukan mobilisasi dengan jalan melukiskan isu-isu untuk para calon pendukung dengan memberikan makna bagi mereka<sup>48</sup>. Secara sederhana Snow mendefinisikan proses pemingkai (*framing process*) sebagai upaya-upaya strategis yang dilakukan secara sadar oleh sekelompok orang untuk menampilkan pemahaman yang sama mengenai dunia dan diri mereka

---

<sup>47</sup>Lihat Opcit Klandermans, 2005 dalam dalam Pdf Irawati "Identitas Kultural dan Gerakan Politik Kerapatan Adat Kutai dalam Representasi Politik Lokal".

<sup>48</sup>Lihat Ibid Irawati Pdf "Identitas Kultural dan Gerakan Politik Kerapatan Adat Kutai dalam



sendiri, yang melegitimasi dan memotivasi aksi-aksi kolektif<sup>49</sup>. Proses pembersihan ini dimaksudkan untuk:

- a. Memperkuat kesadaran kolektif, keputusan-keputusan strategis sebagai bagian dari gerakan.
- b. Mempertegas dan memperkuat subjek kontestasi antara aktor gerakan selaku representasi gerakan dengan negara dan para kelompok-kelompok yang berlawanan<sup>50</sup>.

Secara target, gerakan sosial tersegmentasi berdasarkan besar atau kecilnya perubahan yang dikejar, untuk lebih memperjelas hal tersebut, mari kita simak di bawah ini:

### 1. Target Individu

- a. Gerakan sosial kecil adalah gerakan yang hanya mengejar perubahan perilaku tertentu.
- b. Gerakan sosial penyelamatan adalah gerakan sosial yang mengarah pada individu, namun lebih pada perubahan yang menyeluruh, bukan hanya perilaku tertentu.

### 2. Target Masyarakat

- a. Gerakan sosial reformasi yaitu gerakan sosial yang menuntut perbaikan dari keadaan yang sudah berjalan.

<sup>49</sup>Lihat Op cit Quintan Wiktorowicz (ed) "Aktivisme Islam, Pendekatan Teori Gerakan Sosial" Hal 17

<sup>50</sup>Lihat Op cit Jurnati Pdf "Lentitas, Kultural dan Gerakan Politik Kerapatan Adat Kutai dalam

- b. Gerakan sosial transformatif yaitu gerakan sosial yang menuntut adanya perubahan, juga menyangkut Undang-undang.
- c. Gerakan sosial millenarian yakni gerakan sosial yang berangkat dari ramalan akan sesuatu yang terjadi di depan.
- d. Gerakan transnasional adalah gerakan yang ingin mengubah sebuah keadaan yang terjadi tidak hanya dalam suatu masyarakat, tetapi di seluruh dunia.
- e. Gerakan sosial metamorfotif adalah gerakan untuk mengubah aturan sosial yang lingkupnya dunia<sup>51</sup>.

### **E. Definisi Konsepsional**

Definisi konsepsional merupakan suatu pengertian dari kelompok atau gejala yang menjadi pokok perubahan. Definisi konsepsional ini dimaksudkan sebagai gambaran yang lebih jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atau batasan pengertian tentang istilah yang ada dalam kelompok permasalahan<sup>52</sup>.

Dan adapun definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>51</sup>Lihat Puline Pudjiastuti "*Sosiologi untuk SMA/MA Kelas XII*" PT Grasindo (Gramedia Widiasarana Indonesia), Jakarta, 2007 Hal 65-67

<sup>52</sup>Lihat Skripsi Elza Zikra Mu'alimin "*Analisis Terhadap DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2009-2011*" Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

## A. Konflik

Konflik dapat diartikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat tercapai secara simultan

## B. Partai Politik

Partai politik didefinisikan sebagai sekelompok manusia terorganisir, yang anggotanya sedikit banyak memiliki orientasi nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik serta mempertahankannya guna melaksanakan program yang telah ditetapkan

## C. Gerakan Sosial

Gerakan sosial adalah upaya mengadakan perubahan melalui interaksi yang mengandung persetujuan dan berkelanjutan diantara Negara dan warga Negara.

## F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian. Oleh karena itu, definisi ini disebut juga definisi kerja karena dijadikan pedoman untuk melaksanakan suatu penelitian atau pekerjaan<sup>53</sup>. Dan adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## A. Faktor Penyebab Dan Dampak Konflik

### 1. Penyebab konflik

#### a. Faktor Internal

- Perbedaan Pemahaman antara golongan pragmatis realistik dengan golongan idealis ideologis.
- Golongan idealis ideologis yang tersisihkan di dalam tubuh partai.
- Prilaku politik yang tidak mencerminkan khittah perjuangan partai.
- Perbedaan pandangan mengenai taktik dan strategi dalam mengimplementasikan ruh ideologis kepartaian

#### b. Faktor Eksternal

- Kekalahan partai dalam pemilihan umum menyebabkan partai lebih mengutamakan perluasan ceruk pasar dari pada penguatan basis sosial kader.
- Internalisasi eksternalitas: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendeklarasikan dirinya sebagai partai terbuka, hal ini disebabkan karena partai tidak mungkin menang hanya dengan menggunakan golongan fundamentalis Islam sebagai basis pemilihnya, disamping sebab-sebab yang lainnya.

### 2. Dampak Konflik

#### a. Terhadap Internal Partai

- Adanya faksionalisasi di dalam tubuh partai, yaitu “kubu keadilan” dan “kubu sejahtera”.
  - Menurunnya kualitas dan kuantitas loyalis kader.
  - Kader partai terombang-ambing dalam konflik politik para tokoh (*patron-klien*)
- b. Terhadap Eksternal Partai
- Citra politik Partai Keadilan Sejahtera yang dianggap santun, islami dan bersih dari perilaku koruptif kini sudah luntur.
  - Menurunnya tingkat kepercayaan konstituen terhadap partai Islam secara keseluruhan.
  - Menurunnya elektabilitas partai pada pemilu 2014, jika partai tidak segera merehabilitasi citra politik partai.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Taylor dan Bogdan penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti<sup>54</sup>. Apabila ditinjau dari taraf pemberian informasi atau penyajian penelitian, maka penulis menggunakan

<sup>54</sup>Lihat Bagong Suryanto dan Sutinah “Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan”

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik, fakta-fakta dan menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi<sup>55</sup>.

## 2. Unit Analisa Data

Sesuai dengan permasalahan yang ada dalam pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka unit analisa data dalam penelitian ini adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

## 3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, penjelasannya sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai objek penelitian, dengan cara wawancara kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dan kepada pegiat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diberbagai daerah serta kepada kader senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang keluar, dikeluarkan atau mundur tanpa berita, yang tentunya mampu untuk menjelaskan dan menggambarkan prihal konflik yang terjadi diinternal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

---

<sup>55</sup> lihat Rianto Adi "Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum" Grafit, Jakarta, 2005 Hal 5

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan sebagai objek penelitian<sup>56</sup>, seperti AD-ART Partai Keadilan Sejahtera, Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera, dan lain-lain.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan urutan langkah-langkah yang diperlukan dalam memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa macam teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

### a. Interview

*Interview* merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep penelitian (atau yang terkait dengannya) terhadap individu manusia yang menjadi unit analisa penelitian ataupun terhadap individu manusia yang dianggap memiliki data mengenai unit analisa penelitian<sup>57</sup>. Seperti kepada Yusuf Supendi, Surahman Hidayat, Abdullah Said Baharmus, Salihul Fajri, Fajri Ismail, Endro Nugroho Laksono dan Yusuf Sujana serta kepada pegiat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diberbagai daerah yang tentunya

---

<sup>56</sup>Lihat Dian Eka Rahmawati "Diktat Metode Penelitian Sosial", Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010, Hal 32, Tidak Diterbitkan

<sup>57</sup>Lihat Ibid Dian Eka Rahmawati "Diktat Metode Penelitian Sosial", Hal 33

cukup representatif guna menggambarkan, menjelaskan dan memberikan informasi yang terkait dengan penelitian ini.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan sebagai objek penelitian. Sumber data: buku, website, media masa, dan lain sebagainya<sup>58</sup>.

### 5. Teknik Analisis Data

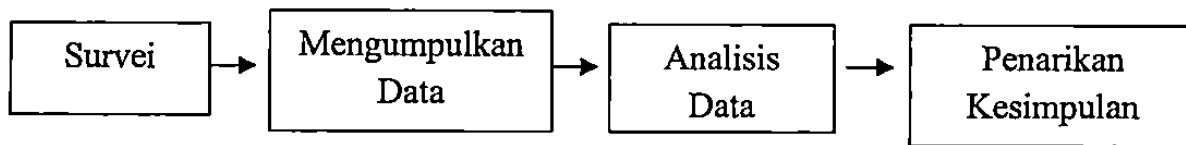
Teknik analisis data yaitu memahami makna dari suatu ucapan, statmen atau tindakan sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa tahapan analisis seperti yang umum digunakan dalam penelitian lainnya. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data, kemudian memulai dan menganalisis data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Pada tahap analisis setidaknya ada beberapa langkah, yaitu reduksi data dimana data yang diperoleh peneliti yang jumlahnya banyak, dibatasi dan dilakukan pengurangan, sehingga sampai batas kemampuan untuk mengatasi dan menganalisis meskipun sangat mungkin terjadi reduksi makna akibat hal ini. Setelah reduksi data, penulis akan melakukan display data dimana data yang telah direduksi akan disajikan untuk membantu dalam penarikan kesimpulan.

---

<sup>58</sup> Lihat Ibid Dien Eka Rahmayati "Ditot Metode Penelitian Sosis" Hal 35



### Bagan Analisis Data<sup>59</sup>



### H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

1. Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, definisi konseptual, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.
2. Bab kedua, memuat deskripsi objek penelitian yang tersegmentasi dalam dua bagian, yang pertama tentang profil Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang terdiri dari sejarah berdirinya Partai Keadilan Sejahtera, struktur organisasi Partai Keadilan Sejahtera, sistem jenjang kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera dan sekilas tentang platform Partai Keadilan Sejahtera. Pada bagian kedua tentang hasil pemilihan umum Partai Keadilan Sejahtera, yang terdiri dari anotasi pemilihan umum Partai Keadilan pada tahun 1999, anotasi pemilihan umum Partai Keadilan Sejahtera pada tahun 2004, anotasi pemilihan umum Partai Keadilan Sejahtera pada tahun 2009.

<sup>59</sup>Lihat Skripsi Kartono "Strategi Gerakan Politik Islam dalam Penegakan Syari'at Islam", Jurusan

3. Bab ketiga, menguraikan dan menggambarkan konflik internal Partai Keadilan Sejahtera yang ditinjau dari faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkannya. Faktor penyebab konflik meliputi: sengketa politik pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden antara Amien Rais-Siswono dan Wiranto-Salahuddin Wahid pada pemilihan umum tahun 2004, konflik persepsi dan wacana dalam acara Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) di Bali tahun 2008 yang tersegmentasi dalam tiga bentuk, yaitu tempat, logo dan wacana partai terbuka, kemewahan versus kesederhanaan, perbedaan pemahaman orientasi dan khittah perjuangan partai serta perbedaan persepsi tentang pencapaian politik pada pemilihan umum tahun 2009. Dan dampak konflik meliputi: faksionalisasi internal partai antara kubu keadilan dan kubu kesejahteraan, pertarungan citra politik PKS dihadapan publik dan pertarungan terbuka antara kubu keadilan dan kubu kesejahteraan.
4. Bab keempat, pada bab ini penulis akan mencoba menarik kesimpulan secara menyeluruh dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya sembari memberikan rekomendasi yang terkait dengan penelitian ini